



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan I
2018

Penyusun:

Penanggung Jawab: Sudarso II Ketua Tim: Soegihartono I Editor:
Jaka Trisna I Desain Grafis: Budi Hartadi I Anggota: Iwan Dwi
Kuswoyo I Armizali I Decta Pitron Lugastoro I Markus Yulianto I

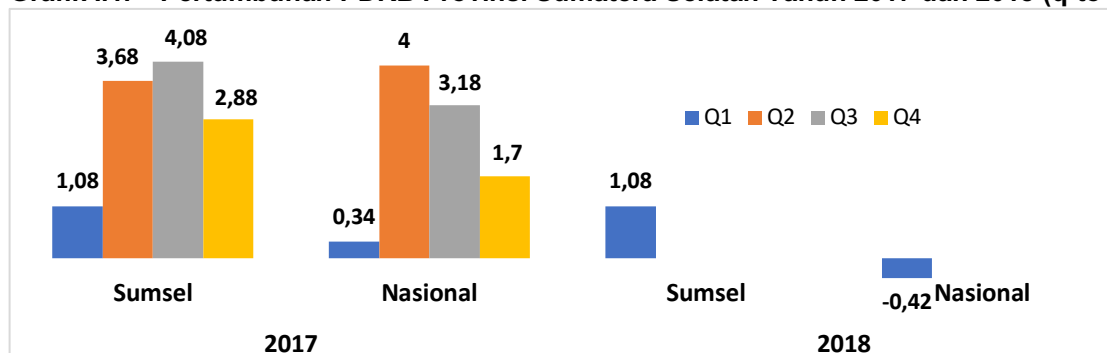
**KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Sumsel**

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah penjumlahan nilai *output* bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu.

Grafik I.1. Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 dan 2018 (q-to-q)



Sumber: BPS

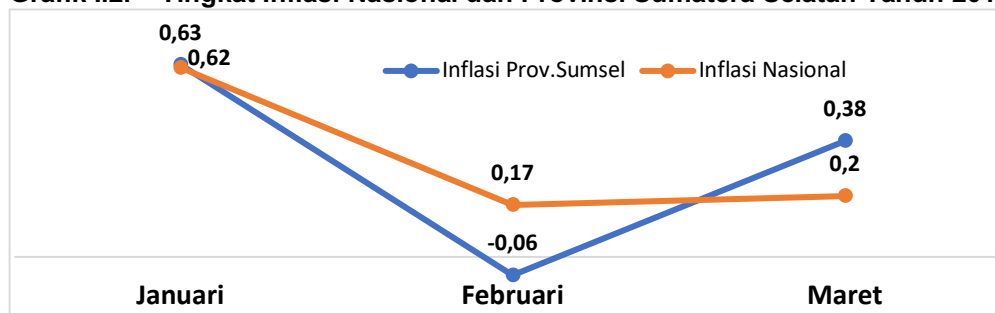
PDRB Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I tahun 2018 meningkat sebesar 1,08 persen (q-to-q), lebih tinggi dibanding dengan PDB nasional yang turun sebesar -0,42 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,56 persen. Sementara dari sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 2,33 persen.

Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan I tahun 2018 tumbuh sebesar 5,89 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 10,30 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Luar Negeri yang tumbuh 11,96 persen.

B. Inflasi

Inflasi merupakan peningkatan harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti konsumsi, berlebihan likuiditas di pasar, atau bahkan spekulasi.

Grafik I.2. Tingkat Inflasi Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018



Sumber: BPS

Grafik di atas menunjukkan bahwa inflasi bulanan pada Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I tahun 2018 berfluktuasi. Pada bulan Januari 2018 inflasi bulanan sebesar 0,63 persen, sedikit di atas inflasi nasional sebesar 0,62 persen. Pada bulan Maret 2018 terjadi peningkatan menjadi 0,38 persen, lebih tinggi dibanding inflasi nasional sebesar 0,20 persen. Adapun komoditas yang menyumbang andil inflasi terbesar pada bulan Maret 2018 adalah cabe merah, bawang merah, sepeda motor, mobil, bawang putih, ikan diawetkan teri, ayam ras dan bensin.

C. Indikator Kesejahteraan

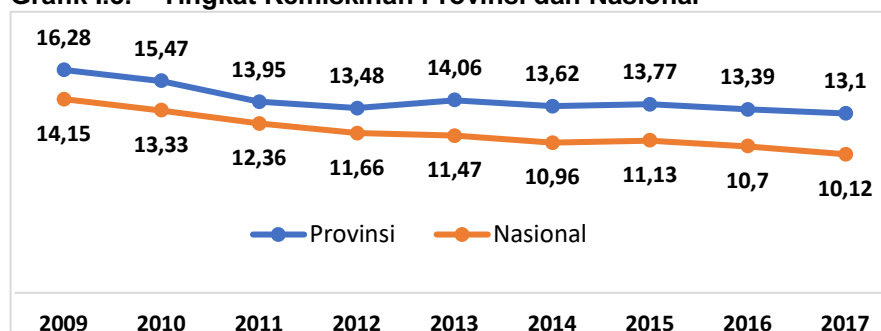
1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Data pada bulan Februari 2018 TPT di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 4,02 persen, mengalami peningkatan dibanding bulan Februari 2017 sebesar 3,80 persen atau naik 0,22 persen. Walaupun sedikit meningkat namun angka TPT tersebut masih relatif normal mengingat kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih dari tren penurunan harga komoditas seperti karet dan batu bara yang menjadi produk andalan Provinsi Sumatera Selatan.

2. Persentase Penduduk Miskin

Penduduk miskin diukur berdasarkan tingkat garis kemiskinan yang ditetapkan di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar Rp388.060,00 di perkotaan dan Rp331.570,00 di pedesaan.

Grafik I.3. Tingkat Kemiskinan Provinsi dan Nasional



Sumber: BPS Sumsel

Berdasarkan garis kemiskinan tersebut maka jumlah penduduk miskin pada periode September 2017 di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 1.086,76 ribu orang atau sebesar 13,10 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,29 persen dibandingkan periode September 2016 sebesar 13,39 persen, sedangkan jumlahnya berkurang sebanyak 9,74 ribu orang dari 1.096,50 ribu orang. Meskipun demikian penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan masih di atas rata-rata penduduk miskin nasional sebesar 10,12 persen.

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Pada bab ini berisi data dan analisis pelaksanaan APBN di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Pendapatan Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi, Belanja Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, dan Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat.

Pelaksanaan APBN di Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel II.1. yang disajikan dalam format *I-Account*.

Tabel II.1. Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan I Tahun 2016-2018 (miliar rupiah)

| Uraian | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Pagu | Realisasi | Pagu | Realisasi | Pagu | Realisasi |
| A. PENDAPATAN NEGARA | 14.978,33 | 2.389,31 | 14.501,68 | 2.238,71 | 14.914,81 | 2.307,33 |
| I. PENERIMAAN DALAM NEGERI | 14.978,33 | 2.389,31 | 14.501,68 | 2.238,71 | 14.914,81 | 2.307,33 |
| 1. Penerimaan Pajak | 13.764,11 | 2.138,60 | 12.899,72 | 1.931,34 | 13.347,34 | 1.925,07 |
| 2. PNBPN | 1.214,22 | 250,72 | 1.601,96 | 307,37 | 1.567,47 | 382,26 |
| II. HIBAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. BELANJA NEGARA | 40.784,83 | 8.714,23 | 48.231,44 | 9.923,03 | 42.266,12 | 8.264,62 |
| I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT | 12.755,71 | 1.371,88 | 12.454,28 | 1.619,62 | 13.688,99 | 1.599,26 |
| 1. Belanja Pegawai | 3.902,92 | 778,24 | 4.137,42 | 809,98 | 4.436,60 | 831,35 |
| 2. Belanja Barang | 5.084,03 | 408,25 | 4.659,04 | 554,03 | 5.602,40 | 477,25 |
| 3. Belanja Modal | 3.738,03 | 185,38 | 3.631,35 | 252,94 | 3.636,43 | 287,49 |
| 4. Belanja Bantuan Sosial | 30,72 | 0,00 | 26,47 | 2,67 | 13,57 | 3,17 |
| 5. Belanja Lain-Lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. TKDD | 28.029,13 | 7.342,36 | 35.777,16 | 8.303,41 | 28.577,13 | 6.665,36 |
| 1. Transfer ke Daerah | 26.248,36 | 6.891,09 | 33.509,90 | 8.303,41 | 26.263,01 | 6.241,44 |
| a. Dana Perimbangan | 26.248,36 | 6.891,09 | 33.509,90 | 8.303,41 | 26.263,01 | 6.241,44 |
| 1) DBH | 7.783,26 | 1.637,38 | 15.375,99 | 3.237,51 | 7.232,03 | 1.370,63 |
| 2) DAU | 11.660,87 | 3.886,96 | 12.219,36 | 4.086,75 | 12.331,39 | 4.110,46 |
| 3) DAK Fisik | 2.591,39 | 246,60 | 2.122,40 | 0,00 | 2.355,81 | 0,00 |
| 4) DID | 165,59 | 0,00 | 82,50 | 82,50 | 396,75 | 128,00 |
| 5) DAK Non Fisik | 4.047,24 | 1.120,15 | 3.709,65 | 896,64 | 3.947,02 | 632,34 |
| b. Dana Otonomi Khusus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d. Dana Transfer Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dana Desa | 1.780,77 | 451,27 | 2.267,26 | 0,00 | 2.314,12 | 423,92 |
| C. SURPLUS/DEFISIT (A-B) | -25.806,50 | -6.324,92 | -33.729,76 | -7.684,31 | -27.351,31 | -5.957,29 |
| D. PEMBIAYAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumber : DJP, OM-SPAN, Monev PA, MPN-G2, Simtrada DJPK (diolah)

Pada tabel II.1. di atas, struktur APBN terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Komponen Penerimaan Dalam Negeri pada sisi Pendapatan berasal dari komponen Perpajakan dan PNBPN. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan

triwulan I tahun 2018 sebesar Rp2,3 triliun atau 15,47 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut berasal dari kontribusi Penerimaan Pajak sebesar 14,42 persen dan PNBPN sebesar 24,39 persen. Komponen Hibah bernilai nihil karena pendapatan Hibah hanya terdapat pada level kementerian/lembaga atau pada APBN tingkat nasional sedangkan Hibah yang terdapat di satuan kerja daerah dicatat sebagai belanja. Sama halnya dengan sisi Pembiayaan yang hanya terdapat pada APBN tingkat nasional sehingga Pembiayaan pada APBN tingkat provinsi bernilai nihil.

Sisi belanja dibagi menjadi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pada Belanja Pemerintah Pusat, penyerapan belanja sedikit menurun dibandingkan tahun 2017 menjadi 11,68 persen. Adapun realisasi TKDD relatif sama dengan realisasi pada tahun 2017 sebesar 23,32 persen. Kondisi Pendapatan dan Belanja diatas menyebabkan sampai dengan triwulan I 2018, APBN di Provinsi Sumatera Selatan mengalami defisit sebesar Rp5,9 triliun

A. Pendapatan Negara

Pendapatan Negara dibagi menjadi Penerimaan Pajak dan PNBPN. Sampai dengan triwulan I 2018 Pendapatan Pajak terealisasi Rp1,9 triliun sedangkan PNBPN sebesar Rp382 miliar. Realisasi pendapatan pajak sedikit menurun dibandingkan tahun 2017 sedangkan realisasi PNBPN meningkat dari 19,2 persen pada tahun 2017 menjadi 24,4 persen pada tahun 2018.

1. Pendapatan Perpajakan

Total pendapatan pajak di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan I 2018 berjumlah Rp1,9 triliun. Realisasi pendapatan ini merupakan yang terendah dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2018. Berikut rincian pendapatan pajak berdasarkan jenis pajak:

Tabel II.2 Pendapatan Perpajakan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018 (miliar rupiah)

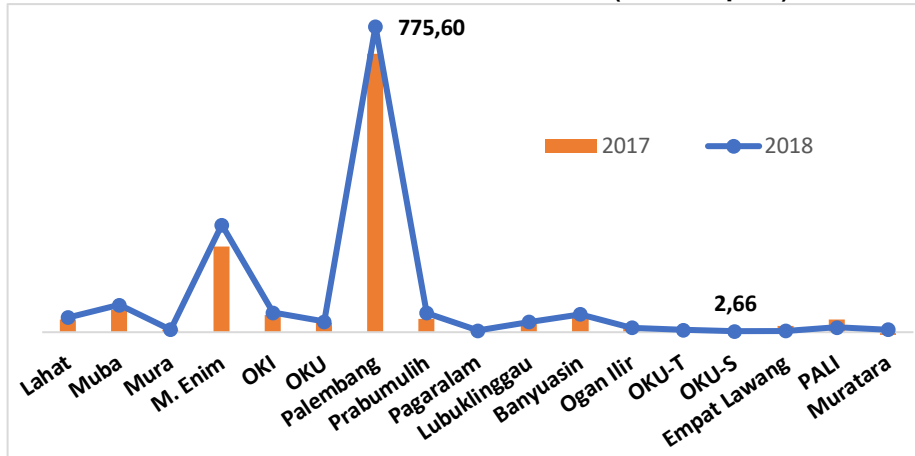
| Jenis Pajak | Realisasi s.d. Triwulan I | | |
|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| PPh (4111) | 1.249,80 | 1.234,75 | 1.403,49 |
| PPN (4112) | 720,73 | 482,22 | 452,28 |
| PBB (4113) | 7,85 | 23,21 | -154,50 |
| Cukai (4115) | 134,21 | 162,94 | 194,56 |
| Pajak Lainnya (4116) | 26,01 | 28,22 | 29,25 |
| JUMLAH | 2.138,60 | 1.931,34 | 1.925,07 |

Sumber : Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel, MPN G-2 (diolah)

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pendapatan total pajak penghasilan di Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I 2018 berjumlah Rp1,4 triliun dengan rincian pendapatan per kabupaten/kota sebagai berikut:

Grafik II.1 Realisasi Pendapatan PPh Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2018 (miliar rupiah)



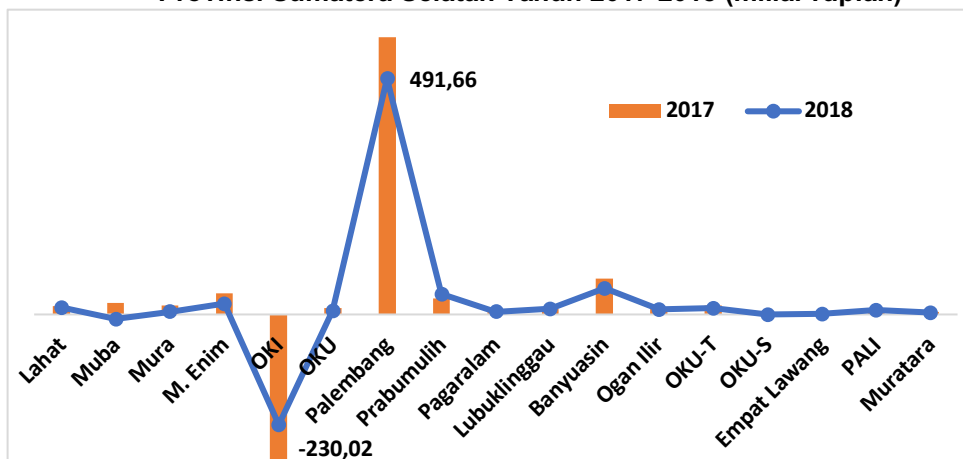
Sumber : Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel (diolah)

Dari 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, pendapatan pajak penghasilan tertinggi terdapat di Kota Palembang disusul kemudian Kabupaten Muara Enim. Adapun pendapatan terendah terdapat di Kabupaten OKU Selatan dengan realisasi sebesar Rp2,66 miliar. Dari grafik diatas terlihat bahwa tren pendapatan PPh pada triwulan I tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun 2017 atau mengalami pertumbuhan 12,24 persen.

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)

Total Pendapatan PPN dan PPnBM di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan I 2018 sebesar Rp452 miliar dengan rincian pendapatan per kabupaten/kota sebagai berikut :

Grafik II.2 Realisasi Pendapatan PPN dan PPnBM Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2018 (miliar rupiah)



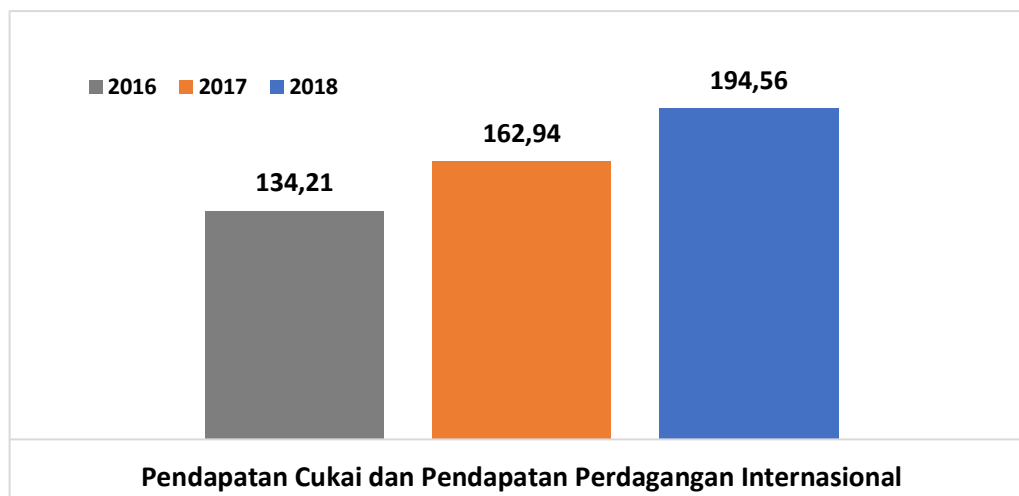
Sumber : Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel (diolah)

Penerimaan pajak berikutnya adalah pendapatan Pajak Pertambahan Nilai yang terdiri dari pendapatan PPN dan pendapatan PPnBM. Berkebalikan dengan PPh, pendapatan PPN pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 5,11 persen dibandingkan tahun 2017 sebagaimana terlihat pada grafik diatas. Kota Palembang masih menjadi kabupaten/kota penyumbang pendapatan PPN tertinggi di lingkup Provinsi Sumatera Selatan dengan penerimaan sebesar Rp491 miliar atau 109 persen dibandingkan total pendapatan PPN sebesar Rp452 miliar. Salah satu penyebab rendahnya total pendapatan PPN pada triwulan I tahun 2018 adalah adanya restitusi pajak kepada perusahaan OKI dan Pulp Paper Mills yang dikembalikan secara bertahap. Restitusi tersebut menyebabkan pendapatan PPN pada Kabupaten OKI pada triwulan I 2018 berjumlah minus Rp230 miliar atau terendah di lingkup Provinsi Sumatera Selatan

c. Pendapatan Cukai dan Pajak Perdagangan Internasional

Pendapatan Cukai dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah Rp194,5 miliar atau mengalami pertumbuhan 19,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017

Grafik II.3 Pendapatan Cukai dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018 (miliar rupiah)



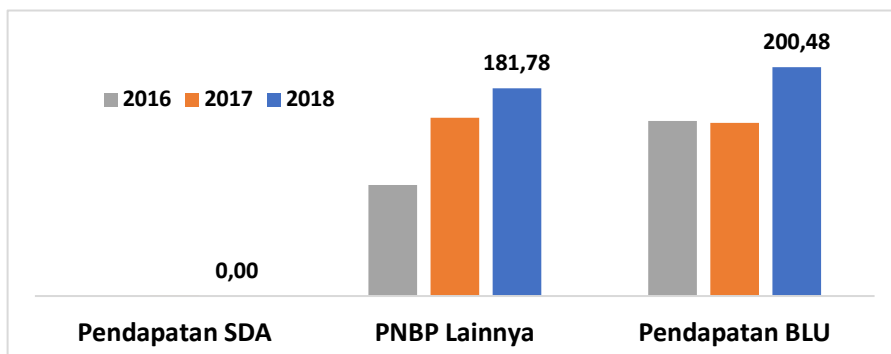
Sumber : OM-SPAN (diolah)

Pendapatan pada sub bab ini merupakan jenis pendapatan yang dikelola oleh Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Berbeda halnya dengan data perpajakan yang disajikan per kabupaten/kota, data pendapatan cukai dan perdagangan internasional disajikan secara total dikarenakan tempat transaksi dari jenis pendapatan ini berpusat di Kota Palembang. Dari gambar diatas, pendapatan cukai dan pendapatan perdagangan internasional di Provinsi Sumatera Selatan senantiasa bertambah. Pendapatan tahun 2017 naik 21,41 persen menjadi Rp 162,9 miliar sedangkan tahun 2018 mengalami pertumbuhan 23,56 persen menjadi Rp 194,5 miliar.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Total penerimaan PNBPN di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan I 2018 berjumlah Rp382 miliar yang berasal dari Pendapatan Lainnya dan Pendapatan BLU. Penerimaan PNBPN di Provinsi Sumatera Selatan menunjukan tren kenaikan dari tahun 2016 sampai 2018 sebagaimana terlihat pada grafik dibawah.

Grafik II.4 Penerimaan PNBPN Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018 (miliar rupiah)



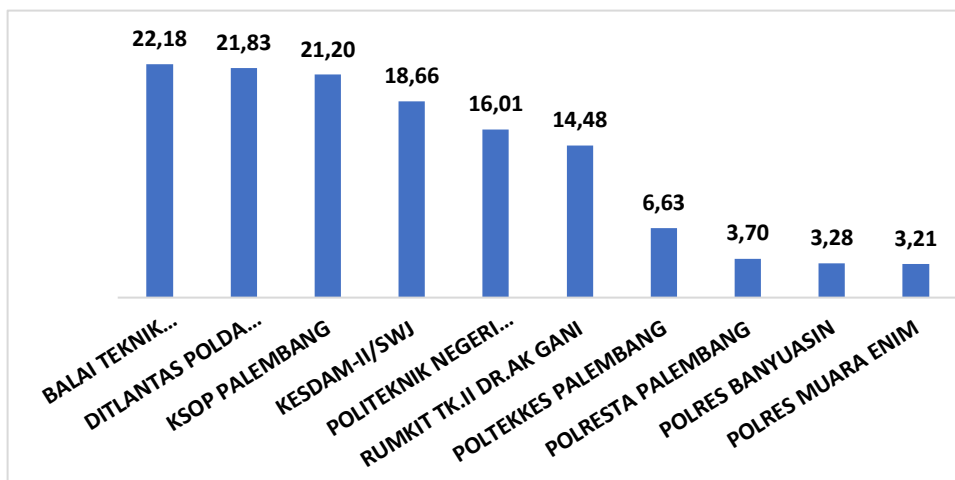
Sumber: OM-SPAN (diakses 07-05-2018)

Pendapatan PNBPN Lainnya pada tahun 2018 mencapai Rp181,78 miliar atau hampir dua kali lipat penerimaan tahun 2016 sedangkan Pendapatan BLU yang mengalami sedikit penurunan pada tahun 2017 membukukan pendapatan sebesar Rp200,48 miliar atau mengalami kenaikan 30,63 persen dibandingkan tahun 2016.

a. Pendapatan PNBPN Lainnya

Pendapatan PNBPN Lainnya sampai dengan triwulan I 2018 berjumlah Rp181,78 miliar atau 47,55 persen total PNBPN keseluruhan. Jumlah tersebut berasal dari penerimaan 302 satker, baik satker umum maupun satker PNBPN. Berikut ini disajikan 10 satker dengan penerimaan PNBPN Lainnya terbesar sampai dengan triwulan I 2018.

Grafik II.5. Satker PNBPN dengan Pendapatan Terbesar s.d. Triwulan I 2018 (miliar rupiah)



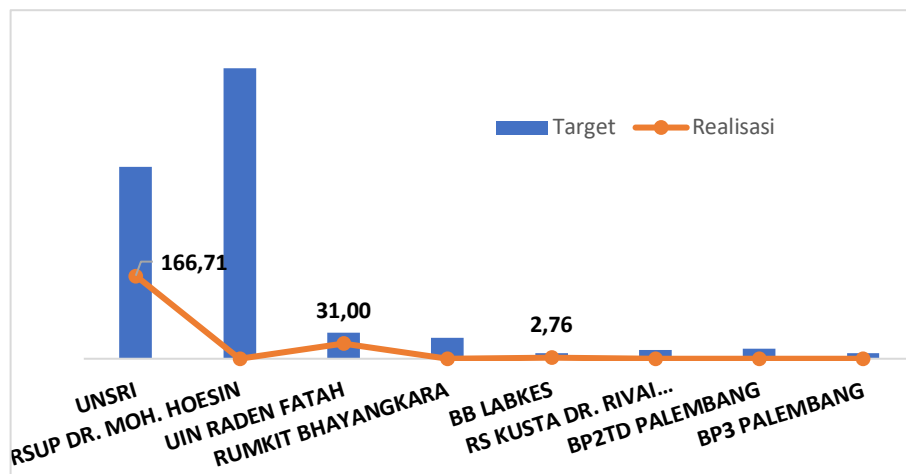
Sumber : OM-SPAN (diakses 04-05-2018)

Dari sepuluh besar satker diatas terdapat 1 satker yang bukan satker PNBPN namun mempunyai pendapatan terbesar yaitu Satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumbangsel. PNBPN sebesar Rp22,18 miliar tersebut merupakan penerimaan kembali belanja modal TAYL. Sedangkan penyumbang pendapatan terbesar pada satker Kepolisian (Ditlantas Polda Sumsel, Polresta Palembang, Polres Banyuasin dan Polres Muara Enim) berasal dari pendapatan pelayanan kepolisian antara lain pendapatan perpanjangan SIM, pengesahan STNK, pendapatan BPKB dan lain-lain. Satker KSOP dengan realisasi pendapatan PNBPN terbesar ketiga yaitu Rp21,2 miliar. Mayoritas pendapatan tersebut berasal dari pendapatan jasa kepelabuhan dengan kontribusi sebesar Rp13,4 miliar atau 63,4 persen. Adapun penyumbang pendapatan dari satker Kesdam dengan realisasi Rp18,66 miliar berasal dari pendapatan dari BPJS kesehatan dengan kontribusi sebesar Rp16,12 miliar atau 86,38 persen

b. Pendapatan BLU

Sesuai dengan namanya, pendapatan PNBPN yang terakhir ini berasal dari Satker BLU (Badan Layanan Umum). Terdapat 7 BLU di Provinsi Sumatera Selatan dengan total pendapatan sampai dengan triwulan I 2018 sebesar Rp200,4 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Grafik II.6. Target dan Realisasi Pendapatan BLU di Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan I 2018 (miliar rupiah)



Sumber : OM-SPAN (diakses 04-05-2018)

Dari grafik diatas terlihat bahwa dari 7 satker BLU yang terdapat di Kota Palembang, baru 3 satker yang membukukan pendapatan BLU. Universitas Sriwijaya membukukan pendapatan sebesar Rp166,71 miliar, UIN Raden Fatah sebesar Rp31 miliar dan BB Laboratorium Kesehatan dengan pendapatan Rp2,76 miliar. Kondisi yang terjadi diatas sangat mungkin terjadi pada satker BLU sebagaimana terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan keistimewaan/karakteristik dari satker BLU itu sendiri dimana satker BLU dapat langsung menggunakan PNBPN yang diperoleh untuk membiayai kegiatan operasional. Adapun pengesahan dari pendapatan tersebut dalam

bentuk SP3B-BLU (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU) biasanya baru disampaikan ke KPPN pada triwulan II.

B. Belanja Negara

Belanja negara dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan triwulan I tahun 2018 berjumlah Rp1,6 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.3 Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018 (miliar rupiah)

| Jenis Belanja | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | Pagu | Realisasi | Pagu | Realisasi | Pagu | Realisasi |
| Belanja Pegawai | 3.902,92 | 778,24 | 4.137,42 | 809,98 | 4.436,60 | 831,35 |
| Belanja Barang | 5.084,03 | 408,25 | 4.659,04 | 554,03 | 5.602,40 | 477,25 |
| Belanja Modal | 3.738,03 | 185,38 | 3.631,35 | 252,94 | 3.636,43 | 287,49 |
| Belanja Bansos | 30,72 | 0,00 | 26,47 | 2,67 | 13,57 | 3,17 |
| Jumlah | 12.755,71 | 1.371,88 | 12.454,28 | 1.619,62 | 13.688,99 | 1.599,26 |

Sumber: Monev PA (diakses 07-05-2018)

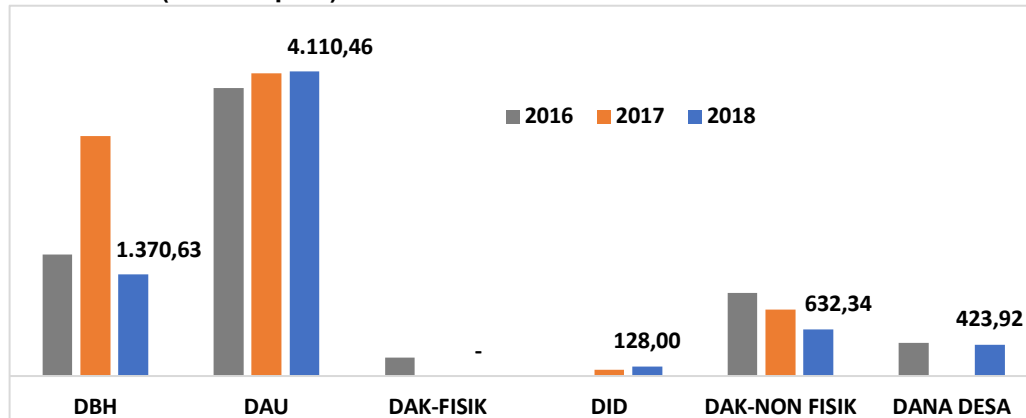
Pagu belanja tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 10 persen dibandingkan pagu tahun 2017 dan menjadi pagu tertinggi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Namun realisasi total pada tahun 2018 mengalami penurunan yang baru mencapai 11,68 persen. Angka tersebut dibawah target realisasi triwulanan sebesar 15 persen bahkan masih dibawah realisasi tahun 2017 sebesar 13 persen. Penurunan realisasi secara keseluruhan disebabkan oleh menurunnya realisasi pada Belanja Barang yang baru mencapai 8,5 persen sedangkan realisasi pada jenis belanja yang lain cenderung mengalami kenaikan. Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang yang memperoleh alokasi pagu terbesar akan meningkat drastis pada triwulan II 2018. Hal tersebut dikarenakan pada periode tersebut terdapat pencairan gaji-13 pada bulan Juni.

2. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah), pemerintah mengalokasikan Belanja Negara untuk Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dana yang bersumber dari APBN ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Pada tahun 2017 terdapat perubahan penyaluran TKDD. Dua dari enam komponen TKDD yaitu DAK Fisik

dan Dana Desa disalurkan melalui KPPN sedangkan sisanya masih tetap disalurkan melalui Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK). TKDD pada tahun 2018 mendapat alokasi pagu Rp28,5 miliar dengan realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp6,6 miliar atau 26,1 persen

Grafik II.7. Realisasi TKDD Lingkup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018 (miliar rupiah)



Sumber: Simtrada, OM-SPAN (diakses 13-05-2018)

Realisasi total TKDD yang disalurkan melalui DJPK dari tahun 2016 sampai dengan 2018 relatif sama dengan persentase masing-masing periode sebesar 28,1 persen, 26,5 persen dan 26,1 persen. Namun jika melihat per jenis TKDD akan nampak fluktuasi realisasi sebagaimana terlihat pada grafik diatas. Sedangkan 2 jenis TKDD yang disalurkan melalui KPPN akan terlihat pola yang berbeda dimana pada triwulan I 2017 belum terdapat realisasi DAK Fisik maupun Dana Desa. Kondisi tersebut dikarenakan masa transisi peralihan pencairan dari DJPK ke KPPN sehingga baru mulai terealisasi pada triwulan II.

Adapun pada tahun 2018, sampai dengan triwulan I baru terdapat realisasi Dana Desa sebesar Rp423,9 miliar sedangkan pada DAK Fisik belum ada realisasi. Belum adanya realisasi DAK Fisik disebabkan adanya beberapa perubahan juknis penyaluran DAK Fisik dalam PMK 122/2017 antara lain periode penyaluran yang lebih lama dan persyaratan data kontrak kegiatan minimal 1 data kontrak kegiatan per bidang.

3. Manajemen Investasi Pusat

Sesuai PMK Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas dan fungsi pelaksanaan fungsi perbendaharaan di daerah sekaligus menjadi perpanjangan pelaksanaan tugas *special mission* Ditjen Perbendaharaan yang diemban oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Lebih lanjut, amanat tersebut dirinci ke dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2017 dimana Kanwil DJPB diberikan kewenangan oleh Direktorat SMI untuk melaksanakan pembinaan dan monitoring atas investasi pemerintah, pinjaman dan kredit program di daerah

**Tabel II.4 Profil Penerusan Pinjaman di Provinsi Sumatera Selatan
Posisi s.d. 31 Desember 2017**

| Debitur | Pinjaman (SLA) | | |
|-------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| | Jumlah SLA | Penarikan | Hak Tagih Pemerintah |
| Pemkot Palembang | 11 | 49.794.345.477,44 | 64.933.488.506,69 |
| PDAM Tirta Musi | 2 | 16.881.325.892,42 | 0,00 |
| Pemkab Muara Enim | 1 | 97.148.652.820,00 | 97.195.920.020,98 |
| Pemkab OKU | 1 | 155.566.680,00 | 0,00 |
| Pemkab Musi Rawas | 1 | 0,00 | 263.817.337,08 |
| Jumlah | 16 | 163.979.890.869,86 | 162.393.225.864,75 |
| Posisi s.d. 2016 | 24 | 415.157.880.490,05 | 188.972.006.390,62 |

Sumber: SLIM (diakses 25-02-2018)

Jumlah penerusan pinjaman di Provinsi Sumatera Selatan berkurang signifikan, dari 8 debitur dengan 24 pinjaman (SLA) menjadi 5 debitur dengan 16 pinjaman (SLA). Debitur yang telah melunasi pada tahun 2017 adalah Pemkot Lubuklinggau, PDAM Kabupaten Lahat dan PDAM Kabupaten OKU. Rekonsiliasi outstanding pinjaman yang dilakukan semesteran berlangsung baik dengan akurasi rekonsiliasi yang mencapai 100 persen. Hak tagih pemerintah (outstanding pinjaman) sampai dengan 2017 sebesar Rp188 miliar.

C. Prognosis Realisasi APBN

Analisis yang digunakan untuk menghitung prognosis Pendapatan dan Belanja Negara sampai dengan triwulan IV tahun 2018 menggunakan analisis trend berdasarkan pagu/target dan realisasi tahun 2015-2017. Penerimaan Pajak diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp10,9 triliun atau 81,67 persen sedangkan pendapatan PNBPN diperkirakan akan meningkat dan terealisasi sebesar Rp3,18 triliun atau 203 persen target yang ditetapkan. Kondisi komponen Pendapatan Negara tersebut sesuai dengan trend selama ini dimana tren penerimaan pajak cenderung stabil diangka 80 persen sedangkan tren pendapatan PNBPN cenderung naik dengan pertumbuhan rata-rata 24 persen.

Adapun realisasi Belanja Negara diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp37 triliun atau 87 persen sesuai dengan tren realisasi belanja dalam kurun waktu 3 tahun terakhir berkisar diangka 90 persen.

Tabel II.3. Perkiraan Realisasi APBN s.d. Akhir Tahun 2018 (miliar rupiah)

| Uraian | Pagu | Realisasi s.d. Tw-I | | Perkiraan Realisasi s.d. Tw-IV | |
|-------------------|------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | Rp | % Realisasi Terhadap Pagu | Rp | % Realisasi Terhadap Pagu |
| Pendapatan Negara | 14.914,81 | 2.307,33 | 15,47% | 10.367,40 | 69,51% |
| Penerimaan Pajak | 13.347,34 | 1.925,07 | 14,42% | 10.901,41 | 81,67% |
| PNBP | 1.567,47 | 382,26 | 24,39% | 3.183,65 | 203,11% |
| Belanja Negara | 42.266,12 | 8.264,62 | 19,55% | 37.088,21 | 87,75% |
| Surplus/Defisit | -27.351,31 | -5.957,29 | -4,08% | -26.720,81 | -18,24% |

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Dalam bab ini diuraikan mengenai perkembangan pelaksanaan APBD di lingkup Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan III Tahun 2017. Terdapat 3 (tiga) sub bab yang menjadi pokok bahasan yaitu Pendapatan, Belanja, dan Prognosis APBD.

Tabel III.1. Realisasi Pendapatan APBD Lingkup Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan I Tahun 2016-2018 (miliar rupiah)

| Uraian | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| PAD | 5,213 | 948 | 7,092 | 971 | 6,660 | 1,215 |
| Pajak Daerah | 3,529 | 675 | 4,155 | 725 | 4,317 | 911 |
| Retribusi Daerah | 232 | 28 | 1,341 | 34 | 244 | 26 |
| Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 190 | 100 | 205 | 63 | 205 | 96 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 1,263 | 144 | 1,391 | 149 | 1,894 | 182 |
| PENDAPATAN TRANSFER | 26,985 | 6,721 | 26,921 | 7,154 | 25,874 | 6,217 |
| DBH Pajak | 3,382 | 694 | 3,355 | 645 | 3,413 | 660 |
| DBH Bukan Pajak | 4,316 | 877 | 3,653 | 1,758 | 3,715 | 715 |
| DAU | 11,661 | 3,711 | 12,382 | 3,523 | 12,312 | 3,959 |
| DAK | 3,633 | 499 | 5,636 | 721 | 3,868 | 551 |
| DID dan Dana Penyesuaian | 3,347 | 863 | 1,015 | 58 | 1,399 | 265 |
| Transfer Pemerintah Provinsi | 549 | 78 | 869 | 441 | 1,142 | 64 |
| Bantuan Keuangan | 98 | - | 13 | 7 | 25 | 3 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 1,348 | 341 | 1,270 | 161 | 2,012 | 262 |
| Hibah | 24 | - | 54 | 1 | 638 | 1 |
| Dana Darurat | - | - | - | - | - | - |
| Lain-lain | 1,324 | 341 | 1,216 | 160 | 1,374 | 261 |
| TOTAL PENDAPATAN | 33,547 | 8,010 | 35,283 | 8,286 | 34,546 | 7,695 |

Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumsel (2018, diolah)

Dari Tabel III.1, realisasi pendapatan APBD sampai dengan triwulan I 2018 sebesar Rp7,7 triliun, menurun 1,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017 dan menurun 1,6 persen dibandingkan tahun 2016. Penurunan tersebut berasal dari realisasi Pendapatan Transfer sedangkan PAD dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah justru mengalami peningkatan secara persentase maupun secara nominal juga meningkat. Proporsi pendapatan daerah yang berasal dari transfer sebesar 80,8 persen masih sangat mendominasi dibandingkan pendapatan yang bersumber dari PAD.

Sedangkan pada sisi realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar Rp18,82 triliun, meningkat sekitar 1,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017 dan tahun 2016. Peningkatan tersebut berasal dari realisasi belanja operasi dari tahun sebelumnya 14,01 persen menjadi 16,01 persen. Kontribusi terbesar realisasi belanja operasi tersebut berasal dari belanja hibah terdapat di Pemda Provinsi Sumsel sebesar Rp380,9 miliar. Tingginya realisasi belanja hibah tersebut antara lain digunakan

untuk hibah dalam rangka pelaksanaan PILKADA yang akan diselenggarakan di beberapa daerah pada bulan Juni tahun 2018.

Tabel III.2. Realisasi Belanja APBD Lingkup Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan I Tahun 2016-2018 (miliar rupiah)

| APBD Klasifikasi Ekonomi | Tw I 2016 | | Tw I 2017 | | Tw I 2018 | |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Belanja Operasi | 22,793 | 3,211 | 23,237 | 3,256 | 24,136 | 3,863 |
| Belanja Pegawai | 11,430 | 1,994 | 11,561 | 2,064 | 12,122 | 2,106 |
| Belanja Barang dan Jasa | 7,201 | 641 | 7,019 | 709 | 8,269 | 781 |
| Belanja Bunga | 6 | 0 | 14 | 3 | 102 | 21 |
| Belanja Subsidi | 43 | 5 | 47 | 4 | 41 | 11 |
| Belanja Hibah | 2,326 | 549 | 2,338 | 475 | 2,044 | 773 |
| Belanja Bantuan Sosial | 18 | 1 | 15 | 0 | 13 | 1 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 1,770 | 21 | 2,242 | 0 | 1,545 | 171 |
| Belanja Modal | 7,847 | 304 | 7,838 | 620 | 7,843 | 227 |
| Belanja Tanah | 368 | 10 | 255 | 15 | 87 | 5 |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 818 | 66 | 1,256 | 109 | 969 | 38 |
| Belanja Gedung dan Bangunan | 1,598 | 72 | 1,750 | 133 | 1,386 | 24 |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 4,956 | 153 | 4,460 | 357 | 5,031 | 151 |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | 97 | 2 | 106 | 4 | 354 | 9 |
| Belanja Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Belanja Aset Lainnya | 10 | 0 | 11 | 3 | 16 | |
| Belanja Tak Terduga | 57 | 1 | 112 | 4 | 113 | 0 |
| Transfer/ Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa | 1,877 | 46 | 1,522 | 129 | 2,782 | 216 |
| TOTAL | 32,575 | 3,562 | 32,709 | 4,009 | 34,874 | 4,306 |

Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumsel (2018, diolah)

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan triwulan I tahun 2018 mencapai 22,27 persen dari target (Rp35,5 triliun).

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

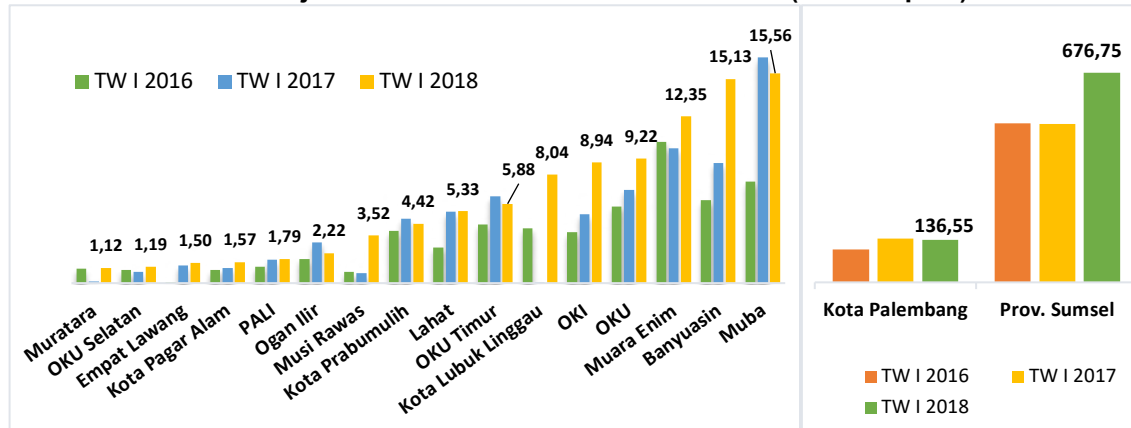
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD Yang Sah.

a. Penerimaan Penerimaan Pajak Daerah

Pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 74,9 persen terhadap PAD, dimana *progresnya* cenderung meningkat setiap periode dari triwulan I tahun 2016 yaitu Rp675 miliar, triwulan I tahun 2017 Rp725 miliar dan triwulan I tahun 2018 sebesar Rp911 miliar. Hal ini mengindikasikan usaha yang telah dilakukan Pemda dalam rangka menggali potensi penerimaan hasilnya semakin baik.

Realisasi Pajak Daerah sampai dengan triwulan I tahun 2018 didominasi dari Pemda Provinsi Sumsel dengan total realisasi sebesar Rp676,7 miliar (74,3 persen total realisasi pajak daerah di seluruh Sumsel). Hal ini bersumber dari pajak kendaraan bermotor yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sedangkan realisasi pajak terbesar kedua yaitu Kota Palembang sebesar Rp133,5 miliar yang sebagian besar bersumber dari pajak hotel dan restoran.

Grafik III.1 Realisasi Pajak Daerah Triwulan I tahun 2016-2018 (miliar rupiah)

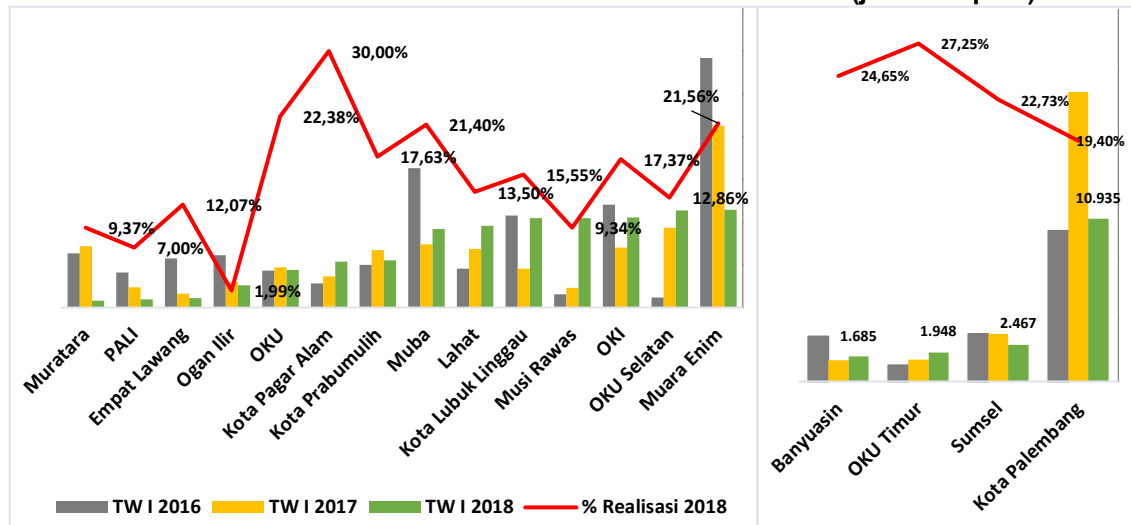


Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumsel (2018, diolah)

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi daerah berkontribusi paling rendah terhadap PAD dimana pada triwulan I tahun 2018 hanya 2 persen. Realisasi penerimaan retribusi mencapai Rp26 miliar, meningkat 8,3 persen dibandingkan dengan realisasi triwulan I tahun 2017. Realisasi retribusi tertinggi berasal dari Kota Palembang yaitu Rp10,9 miliar yang antara lain bersumber dari retribusi perizinan, sampah, parkir dan pasar.

Grafik III.2. Realisasi Retribusi Daerah Triwulan I Tahun 2016-2018 (jutaan rupiah)

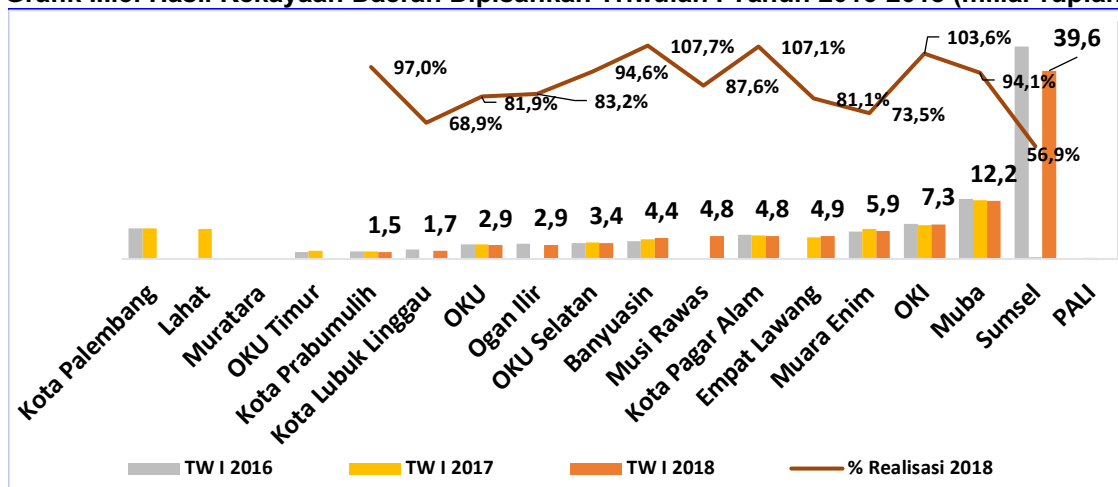


Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumsel (2018, diolah)

c. Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HKYD) triwulan I tahun 2018 Rp96 miliar, meningkat drastis dibandingkan periode sebelumnya. Terlihat bahwa realisasi tertinggi terjadi di triwulan I tahun 2017 dan 2018, dimana realisasi tertinggi terdapat di Provinsi Sumsel Rp39,6 Miliar dan Kab. Muba Rp12,2 Miliar sedangkan Kabupaten PALI dan Muratara sampai dengan triwulan I tahun 2018 tidak terdapat realisasi. Hal ini disebabkan karena Kab. PALI dan Muratara merupakan kabupaten yang relatif baru.

Grafik III.3. Hasil Kekayaan Daerah Dipisahkan Triwulan I Tahun 2016-2018 (miliar rupiah)



Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumsel (2018, diolah)

Tingkat kemandirian keuangan daerah diperoleh dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah sangat rendah dimana keseluruhan menunjukkan angka di bawah 15 persen. Tingkat kemandirian keuangan yang tertinggi di Provinsi Sumsel yaitu 38,2 persen, sedangkan di Kabupaten yang relatif baru yaitu di Kab. Empat Lawang, Muratara, PALI jauh lebih rendah dari rata-rata regional bahkan di bawah 5 persen.

"..Kepala Bapenda Provinsi Sumsel Neng Muhaiba menyatakan akan meningkatkan PAD dari Pajak Perusahaan yaitu dengan menjalin kerjasama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mengetahui seberapa besar Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang harus dibayar".
(<http://palembang.tribunnews.com/2018/03/23/guna-capai-target-bapenda-sumsel-tingkatkan-pad-dari-pajak-perusahaan>, diakses tanggal 11 Mei 2018)

2. Pendapatan Transfer

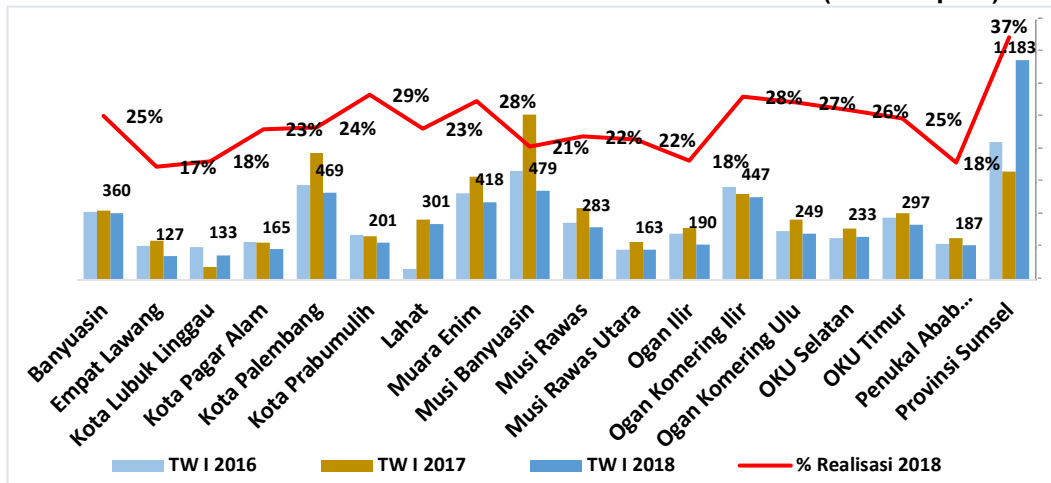
Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar Rp6,2 triliun, yang bersumber dari penerimaan DAU, DBH Non Pajak, DAK, dan DBH Pajak. Dalam beberapa tahun terakhir penerimaan DAU dan DBH merupakan sumber utama Pendapatan Transfer.

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat lingkup Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:



Grafik III.4. Realisasi Transfer Pusat Triwulan I Tahun 2016-2018 (miliar rupiah)



Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumsel (2018, diolah)

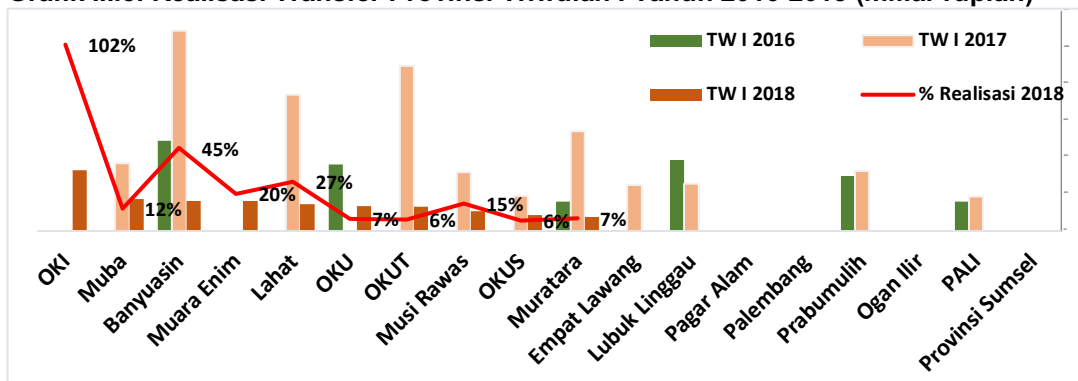
Realisasi tertinggi Transfer Pemerintah Pusat per triwulan I tahun 2018 terdapat di Provinsi Sumsel dan Kab. Muba yaitu Rp1.183 miliar dan Rp479 miliar. Pendapatan transfer secara mayoritas berasal dari DAU dan DBH Non Pajak yang berkontribusi sangat besar terhadap total pendapatan transfer yaitu mencapai sebesar 75,2 persen dari penerimaan dana transfer.

"..Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Sudarso mengungkapkan baru 5 dari 14 kabupaten/kota di Sumsel yang menerima dana desa tahap I tahun 2018 yang disebabkan oleh belum adanya peraturan kepala daerah terkait alokasi dana desa, berakibat lambannya proses penyerapan dana desa untuk tahun 2018".
(<http://palembang.tribunnews.com/2018/03/06/baru-5-kabupaten-kota-di-sumsel-yang-menerima-dana-desa-tahap-pertama-tahun-2018>, diakses tanggal 11 Mei 2018)

b. Transfer Dari Pemerintah Provinsi

Transfer dari Pemerintah Provinsi merupakan transfer atau bagi hasil dari Pemerintah Provinsi kepada Kab/Kota yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Realisasi transfer Bagi Hasil Pajak sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar Rp64 miliar.

Grafik III.5. Realisasi Transfer Provinsi Triwulan I Tahun 2016-2018 (miliar rupiah)



Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumsel (2018, diolah)

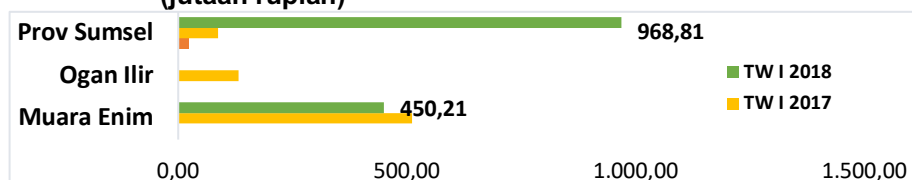
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Hibah, Dana Darurat, Dana Penyesuaian, Dana Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan, dan Pendapatan Lainnya. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sampai dengan triwulan I tahun 2018 mencapai Rp262 miliar (13,02 persen).

a. Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah sampai dengan triwulan I tahun 2018 Rp1,4 miliar (0,22%). Pada triwulan I tahun 2018 hanya terdapat dua kab/kota yang mendapat hibah yaitu Kabupaten Muara Enim Rp450,2 juta dan Provinsi Sumatera Selatan Rp968,8 juta.

Grafik III.6. Realisasi Hibah Kabupaten/Kota Triwulan I Tahun 2016-2018 (jutaan rupiah)

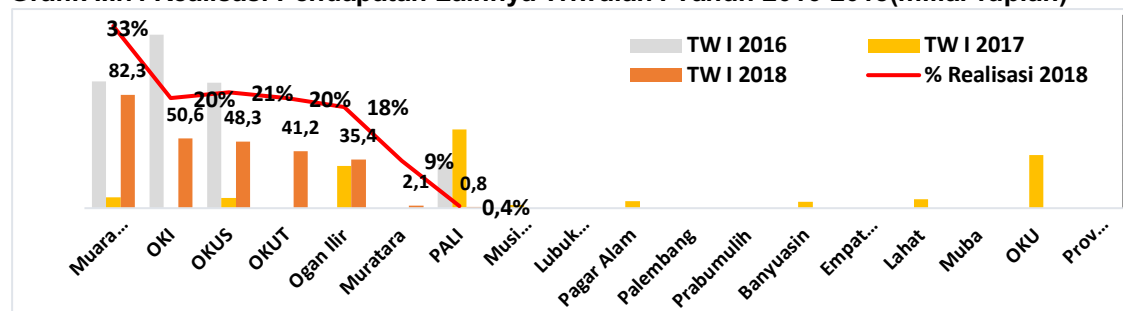


Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumsel (2018, diolah)

b. Pendapatan Lainnya

Realisasi Pendapatan Lainnya per triwulan I tahun 2018 mengalami peningkatan 5,8 persen dari tahun 2017. Realisasi tertinggi pada Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang masing-masing sebesar Rp 82,3 miliar dan 50,6 miliar.

Grafik III.7. Realisasi Pendapatan Lainnya Triwulan I Tahun 2016-2018(miliar rupiah)



Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumsel (2018, diolah)

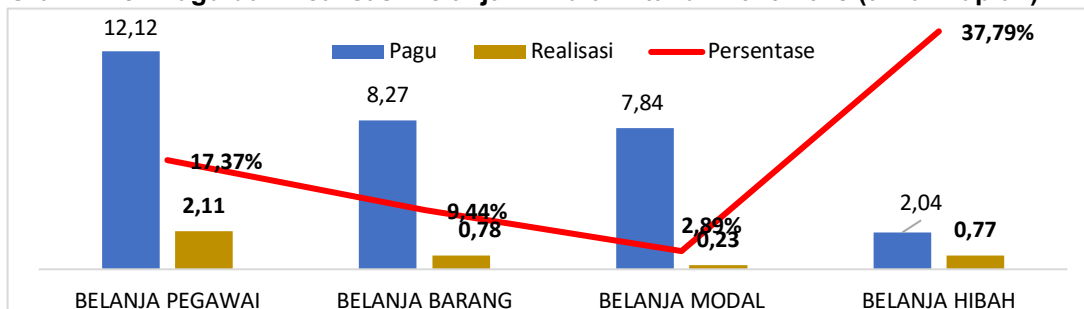
B. Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer/ Bagi Hasil Ke Daerah. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar Rp4,3 triliun (12,35 persen).

1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Belanja pegawai dan belanja barang merupakan jenis belanja dengan pagu tertinggi masing-masing Rp12,1 triliun dan Rp8,3 triliun dengan realisasi Rp2,1 triliun (17,4%) dan Rp781 miliar (9,4%). Sedangkan belanja modal yang merupakan belanja produktif antara lain untuk infrastruktur realisasinya masih sebesar Rp226 miliar (2,89 persen).

Grafik III.8. Pagu dan Realisasi Belanja Triwulan I tahun 2016-2018 (triliun rupiah)

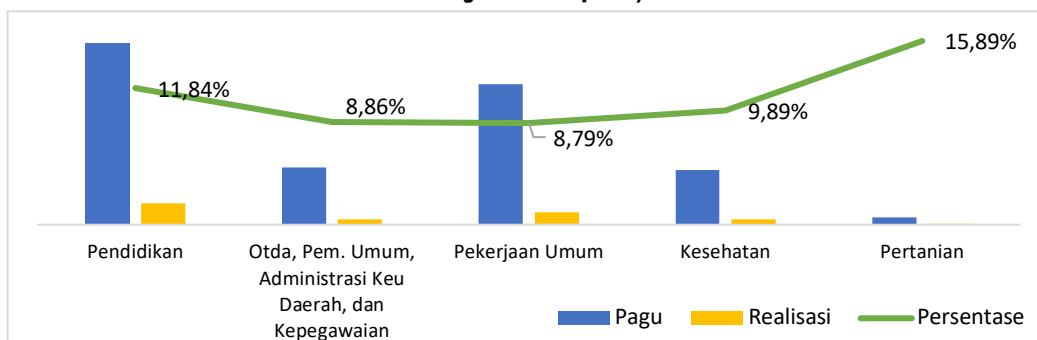


Sumber : Pemda Lingkup Provinsi Sumsel (2018), diolah

2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Pagu belanja berdasarkan urusan yang tertinggi yaitu pada urusan pendidikan dan pekerjaan umum masing-masing Rp1,57 triliun dan Rp1,21 triliun. Tingginya pagu pekerjaan umum disebabkan karena Provinsi Sumsel sedang mempersiapkan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan *Asian Games* pada tahun 2018 ini. Namun tingginya pagu pekerjaan umum belum diiringi dengan penyerapan yang baik, sampai dengan triwulan I tahun 2018 realisasinya baru mencapai 8,79 persen atau sebesar Rp106,7 miliar.

Grafik III. 9. Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan di Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2018 (jutaan rupiah)



Sumber: Pemda Lingkup Provinsi Sumsel (2018, diolah)

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Triwulan II Tahun 2018

Metode yang digunakan untuk menghitung prognosis atau perkiraan realisasi APBD sampai dengan triwulan II tahun 2018 adalah menggunakan analisis tren. Data yang digunakan merupakan data realisasi APBD tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Pada tabel III.3. terlihat bahwa pendapatan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2018 diperkirakan mencapai 50,19 persen dari target Rp34,55 triliun. Sedangkan realisasi belanja daerah diperkirakan mencapai 34,18 persen dari pagu Rp34,87 triliun.

Tabel III.3. Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan II Tahun 2018 dengan analisis tren (triliun rupiah)

| Uraian | Pagu | Realisasi Triwulan I | | Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan II | |
|-------------------|-------|----------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| | | Rp | % Realisasi | Rp | % Realisasi |
| Pendapatan Daerah | 34.55 | 7.70 | 22.27% | 17.34 | 50.19% |
| Belanja Daerah | 34.87 | 4.31 | 12.35% | 11.92 | 34.18% |

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu.

Pendapatan negara konsolidasian Triwulan I Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya hampir seluruh komponen pendapatan negara yang meliputi penerimaan perpajakan dan pendapatan bukan pajak. Pajak dalam negeri sebagai komponen terbesar pendapatan perpajakan meningkat 9,52 persen dengan kontribusi mencapai 98,83 persen, sedangkan pada komponen pendapatan bukan pajak, kontributor terbesar berasal dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan kontribusi mencapai 32 persen.

Tabel IV.1. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2018 (jutaan rupiah)

| Uraian | 2018 | | | Kenaikan | 2017 |
|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------|----------------|
| | Pusat | Daerah | Konsolidasi | | Konsolidasi |
| Pendapatan Negara | 2.112.389,87 | 1.541.022,80 | 3.656.742,10 | 8% | 3.392.062,71 |
| Pendapatan Perpajakan | 1.730.129,21 | 911.064,65 | 2.641.193,86 | 10% | 2.410.498,05 |
| Pendapatan Bukan Pajak | 382.260,66 | 627.730,44 | 1.009.991,10 | 5% | 970.369,35 |
| Hibah | 0 | 2.226,71 | 2.226,71 | 205% | 728,84 |
| Transfer | 0 | 6.132.436,09 | 3.330,42 | -68% | 10.466,46 |
| Belanja Negara | 1.599.291,69 | 4.305.790,01 | 5.905.081,70 | 5% | 5.628.254,69 |
| Belanja Pemerintah | 1.599.291,69 | 3.918.661,39 | 5.517.953,07 | 1% | 5.511.539,25 |
| Transfer | 6.132.436,09 | 387.128,62 | 387.128,62 | 232% | 116.715,44 |
| Surplus/(Defisit) | 513.098,18 | (2.764.767,21) | (2.248.339,60) | 3% | (2.236.191,98) |
| Pembiayaan | 0 | (105.658,92) | (105.658,92) | -910% | (1.178.355,14) |
| Penerimaan | 0 | 205.788,81 | 205.788,81 | -51% | 421.956,20 |
| Penerimaan Daerah | 0 | 205.788,81 | 205.788,81 | -51% | 421.956,20 |
| Pengeluaran | 0 | 311.447,73 | 311.447,73 | -805% | 1.600.311,34 |
| Pengeluaran Daerah | 0 | 311.447,73 | 311.447,73 | -805% | 1.600.311,34 |
| Sisa Lebih (Kurang) | 513.098,13 | (2.870.426,13) | (2.353.998,52) | 31% | (3.414.547,12) |
| Pembiayaan Anggaran | 513.098,13 | (2.870.426,13) | (2.353.998,52) | 31% | (3.414.547,12) |

Sumber: LKPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel (2018), diolah.

Dari sisi belanja negara juga menunjukkan hal yang sama, terjadi peningkatan sebesar 5 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi belanja pemerintah terbesar terjadi pada belanja pegawai yang meningkat 2,21 persen. Namun untuk belanja yang sifatnya produktif, yaitu belanja barang dan belanja modal menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini biasa terjadi pada awal tahun

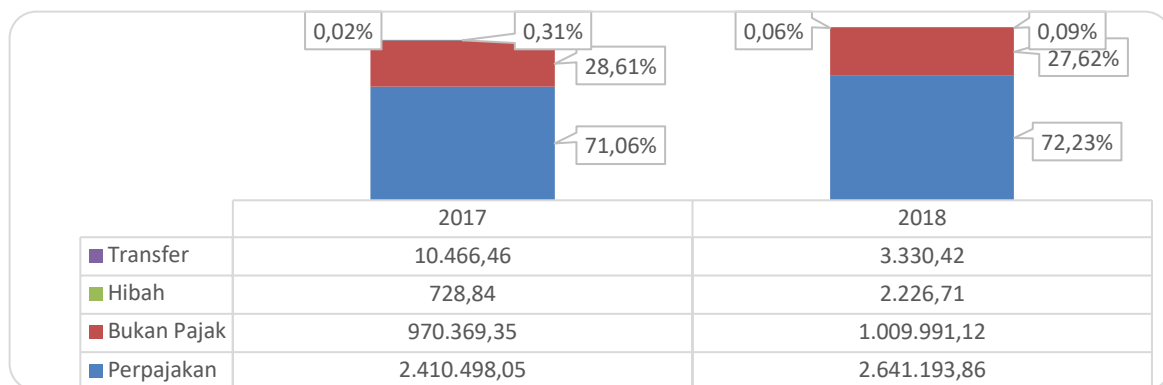
anggaran, yaitu belanja masih didominasi oleh belanja pegawai dan untuk kedua belanja produktif tersebut akan mulai meningkat pada periode triwulan berikutnya.

B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

Pendapatan Konsolidasian adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun *resiprokal* (berelasi).

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

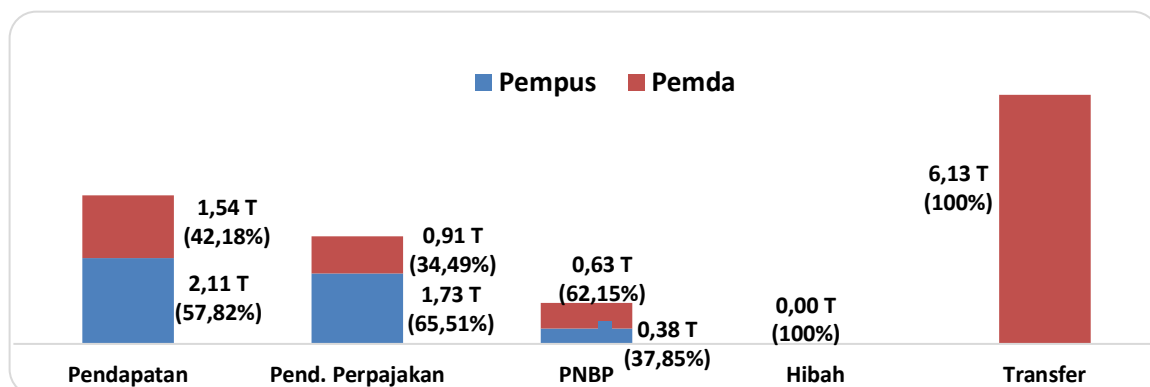
Grafik IV.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2018 dan Tahun 2017 (jutaan rupiah)



Sumber: LKPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel (2018), diolah.

Grafik IV.1 menunjukkan komposisi pendapatan konsolidasian Triwulan I Tahun 2018 didominasi oleh penerimaan perpajakan sebesar 72,23 persen. Secara nominal penerimaan perpajakan meningkat 10 persen atau mencapai Rp230,69 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi komposisi, terjadi peningkatan tipis persentase penerimaan pajak dari 71,06 persen menjadi 72,23 persen. Namun pendapatan bukan pajak mengalami penurunan komposisi dari 28,61 persen turun tipis menjadi 27,62 persen. Terdapat 2 (dua) komponen pendapatan yang tumbuh signifikan, yaitu pendapatan BLU dan pajak perdagangan internasional.

Grafik IV.2 Perbandingan Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2018 (triliun rupiah)



Sumber: LKPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel (2018), diolah.

Grafik IV.2 menunjukkan pendapatan konsolidasian berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apabila dibandingkan, pendapatan pemerintah pusat masih mendominasi pendapatan konsolidasian yang mencapai 55,82 persen, sedangkan pendapatan pemerintah daerah mencapai 42,18 persen. Dilihat lebih detail lagi, pendapatan tersebut didominasi oleh pendapatan yang berasal dari pendapatan perpajakan. Pendapatan perpajakan itu sendiri didominasi oleh penerimaan dari pemerintah pusat sebesar 65,51 persen. Namun dominasi pemerintah pusat tidak terjadi pada penerimaan bukan pajak, mayoritas penerimaannya berasal dari pemerintah daerah yang mencapai 62,15 persen. Sedangkan dua jenis penerimaan lainnya, yaitu hibah dan transfer seluruhnya berasal dari pemerintah daerah.

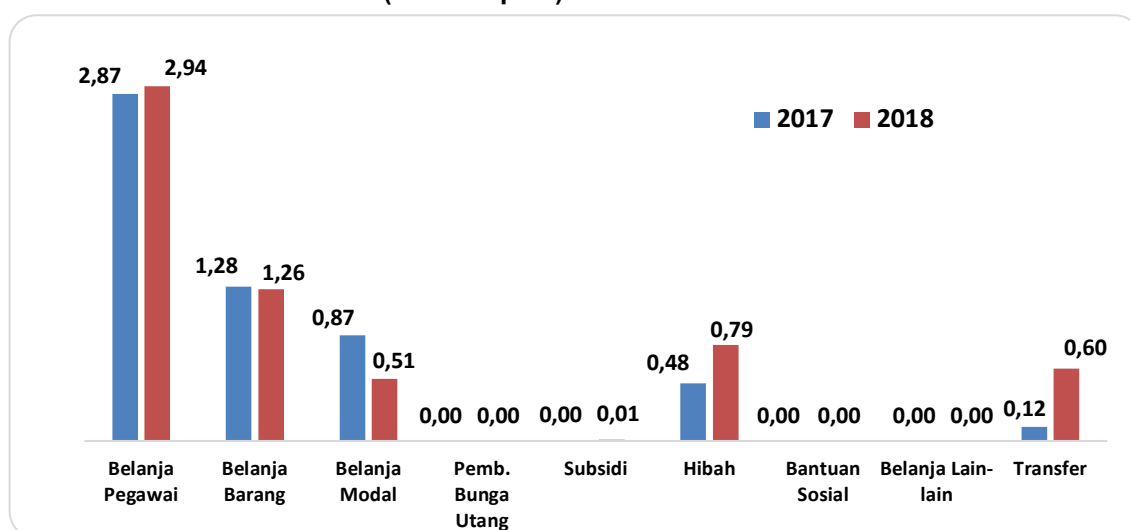
C. BELANJA KONSOLIDASIAN

Belanja Konsolidasian adalah konsolidasian antara seluruh belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun *resiprokal* (berelasi).

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Belanja Konsolidasian Triwulan I Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 7,88 persen dari Rp4,64 triliun pada Triwulan I Tahun 2017 menjadi Rp5 triliun. Kontribusi belanja paling besar berasal dari belanja pegawai yang mencapai 58,80 persen dari total belanja konsolidasian. Hal ini mengindikasikan bahwa pada awal tahun 2018 belanja pemerintah didominasi oleh belanja yang tidak produktif dikarenakan belanja produktif seperti belanja barang dan terutama belanja modal masih dalam tahap proses pengadaan barang/jasa. Biasanya untuk kedua jenis belanja tersebut akan mulai meningkat realisasinya pada triwulan selanjutnya. Hal tersebut dapat dilihat pada Grafik IV.3 di bawah ini:

Grafik IV.3 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2018 (triliun rupiah)



Sumber: LKPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel (2018, diolah).

Hal lain yang dapat dilihat secara lebih detail dari grafik di atas adalah belanja pegawai mengalami peningkatan sebesar 2,21 persen, sedangkan belanja barang dan belanja modal mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Belanja barang turun 1,35 persen dan belanja modal turun cukup besar mencapai 41,11 persen. Seperti dijelaskan sebelumnya kedua jenis belanja ini cenderung turun disebabkan proses pengadaan barang/jasa yang baru dimulai pada awal tahun anggaran. Untuk jenis belanja lainnya seperti hibah dan bantuan sosial juga mengalami peningkatan yang masing-masing sebesar 67,12 persen dan 27,53 persen.

D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Berikut adalah ringkasan Laporan Operasional sebagai salah satu komponen Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun Pelaporan 2018:

| | |
|--|----------------------------|
| Transaksi yang mempengaruhi kekayaan neto | |
| Pendapatan: | 4.401.467.819.095 |
| a. Pajak | 1.730.024.968.263 |
| b. Kontribusi sosial | - |
| c. Hibah | 2.366.513.791.318 |
| d. Pendapatan lain | 304.929.059.514 |
| Beban: | 5.234.193.443.212 |
| a. Kompensasi pegawai | 841.785.813.483 |
| b. Penggunaan barang dan jasa | 441.962.287.265 |
| c. Konsumsi aset tetap | - |
| d. Bunga | - |
| e. Subsidi | - |
| f. Hibah | 3.922.416.842.534 |
| g. Manfaat sosial | 3.167.400.000 |
| h. Beban Lainnya | 24.861.099.930 |
| Keseimbangan operasi bruto/neto | (832.725.624.117) |
| Transaksi Aset Non Keuangan Neto | 288.359.434.890 |
| a. Aset tetap | 269.691.187.460 |
| b. Persediaan | - |
| c. Barang berharga | - |
| d. Aset non produksi | 18.668.247.430 |
| Net Lending/Borrowing | (1.121.085.059.007) |
| Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban | 1.121.085.059.007 |
| a. Akuisisi Neto Aset Keuangan | (3.266.866.744.478) |
| - Domestik | (3.266.866.744.478) |
| - Luar Negeri | - |
| b. Keterjadian Kewajiban | (55.400.000.000) |
| - Domestik | (55.400.000.000) |
| - Luar Negeri | - |
| SILPA Konsolidasian | - |

Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Belanja Pemerintah dihitung dengan cara membandingkan nilai Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan PDRB. Sedangkan kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Investasi dihitung dari perbandingan nilai PMTB dibagi dengan PDRB.

Dari tabel laporan operasional tersebut diatas dan data BPS dapat diketahui bahwa:

1. Pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar Rp1.286.915.500.748,- yang terdiri dari:
 - a. Kompensasi pegawai sebesar Rp841.785.813.483,-
 - b. Penggunaan barang dan jasa sebesar Rp441.962.287.265,-
 - c. Konsumsi aset tetap sebesar Rp0,-
 - d. Manfaat sosial sebesar Rp3.167.400.000,-
2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PTMB) sebesar Rp269.691.187.460,-
3. PDRB Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp71,62 triliun.

Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB dapat diketahui dengan membandingkan pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut terhadap PDRB sehingga angka yang diperoleh adalah sebesar 1,80 persen. Demikian juga kontribusi belanja aset tetap pemerintah sebagai PMTB dari pemerintah dibandingkan dengan nilai PDRB sehingga diperoleh angka sebesar 0,38 persen. Perhitungan tersebut belum memasukkan komponen output dari Bank Indonesia sebagaimana formula yang dilakukan BPS sehingga terjadi perbedaan jika dibandingkan dengan perhitungan yang dilakukan oleh BPS yang mencatat kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB pada periode yang sama sebesar 6,07 persen.

V. BERITA FISKAL REGIONAL

Tantangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sumatera Selatan Tahun 2018

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 mengusung tema “Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional”. Tema tahun 2018 tersebut sudah sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 yaitu “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Tahapan pembangunan tahun 2018 di Provinsi Sumatera Selatan diarahkan untuk:

1. Meningkatnya standar pelayanan pendidikan dan kesehatan sesuai standar nasional dan ASEAN;
2. Tercapainya target pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
3. Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api sebagai kawasan/klaster dan simpul industri pengolahan berbasis pertanian dan pertambangan, dan perdagangan internasional;
4. Tercapainya kemandirian pangan daerah;
5. Terbangunnya industri olahraga dan jasa pariwisata yang bermutu sesuai dengan standar internasional;
6. Berkembangnya pusat inovasi dan *technopark* sesuai standar nasional dan ASEAN.

Dalam rangka mewujudkan tahapan pembangunan tersebut sangat diperlukan adanya tata kelola keuangan daerah yang baik sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan dari program-program pembangunan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan belanja mandatori yang belum maksimal
2. Anggaran yang tidak fokus terhadap prioritas daerah
3. Sebagian besar Pemda belum menerapkan *e-government*.
4. Sebagian besar Pemda belum menerbitkan Perda tentang Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK).

Pertama, pemenuhan belanja mandatori yang belum maksimal. Belanja mandatori terdiri dari yaitu pendidikan 20%, kesehatan 10%, infrastruktur 25% dari dana transfer umum, dan alokasi dana desa sebesar 10% dari Dana Transfer Umum. Dari belanja mandatori tersebut, masih terdapat 3 daerah (16,7% dari total pemda) yang belum memenuhi di bidang pendidikan, 6 pemda (33,3%) belum memenuhi belanja mandatori bidang infrastruktur dan 8 kabupaten/kota (44,4%) dari 14 kab/kota belum memenuhi belanja mandatori untuk Alokasi Dana Desa.

Tantangan kedua adalah anggaran yang tidak fokus terhadap prioritas daerah. Hal ini terlihat dari sulitnya sinkronisasi dan harmonisasi Belanja APBD dengan program dalam Belanja Kementerian/Lembaga. Rata-rata jumlah Program dalam APBD di daerah Sumatera Selatan adalah 154 program, lebih banyak dari rata-rata nasional yang

sebanyak 153 Program. Program paling banyak terdapat di Kabupaten Banyuasin sebanyak 193 Program dan paling sedikit di Kab.PALI sebanyak 125 program.

Ketiga adalah masih banyak pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang belum menerapkan *e-government* dalam pengelolaan keuangan daerah. *E-government* meliputi *e-planning*, *e-budgetting*, *e-procurement*, dan aplikasi penatausahaan sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Di Sumatera Selatan baru terdapat 4 Pemda yang menerapkan *e-planning* yaitu Provinsi Sumsel, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Muara Enim. Sedangkan untuk *e-budgetting* belum ada Pemda di wilayah Provinsi Sumsel yang menerapkan. Untuk *e-procurement* dan aplikasi penatausahaan sudah diterapkan di seluruh Pemda di Sumsel.

Terakhir, sebagian besar daerah termasuk di Sumatera Selatan belum memiliki Perda tentang Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK). Harga satuan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah sehingga menjadi celah terjadinya in-efisiensi anggaran bangunan konstruksi melalui *mark up* harga satuan dan kolusi dengan kontraktor. Pos kurang efisien yang terjadi di Sumatera Selatan adalah uang harian Dalam Kota di Kabupaten Musi Rawas dan Uang Harian Jakarta di Kabupaten Ogan Ilir.

Tantangan-tantangan yang dihadapi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Sumatera Selatan tersebut memerlukan perhatian agar dapat segera diatasi. Pengelolaan keuangan daerah perlu berpedoman pada prinsip-prinsip *good governance* yang merupakan syarat penting bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan pro rakyat. Strategi belanja daerah yang pro-rakyat yaitu dengan fokus belanja pada perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan dan perbaikan kualitas layanan publik.

Strategi tersebut dapat diwujudkan dengan *stream lining* belanja pegawai dan operasional dan memperbesar belanja produktif dan belanja modal untuk infrastruktur publik dibandingkan dengan belanja pegawai. Pemda perlu melakukan optimalisasi dana *idle* melalui Perkada SBM, SBK, dan Satuan Harga. Selain itu perlu diterapkan perencanaan dan pengawasan keuangan daerah melalui *e-government: e-planning, e-budgetting, dan e-procurement* serta peran masyarakat. Kemudian *refocusing* perencanaan belanja APBD pada program prioritas dan ketepatan waktu penetapan APBD yang didukung percepatan pelaksanaan serta penyerapan agar berdampak ekonomi dan sosial.

Jika terjadi kegagalan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel maka akan berpotensi menjadi titik rawan terhadap penyalahgunaan, penyelewengan, dan praktek-praktek koruptif. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK saat ini terdapat 208 temuan dan 215 permasalahan terkait dengan tata kelola keuangan. Selain itu terdapat 3 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kerugian dan potensi kerugian negara pada tahun 2017 sebesar RP77,34 miliar. Hal-hal seperti ini tentunya akan dapat dihindari jika reformasi tata kelola keuangan daerah dapat diwujudkan.

